

**KOMUNIKASI POLITIK WALIKOTA BANDUNG**  
***POLITICAL COMMUNICATION OF BANDUNG***  
***MAYOR***

**Achmad Abdul Basith, Dadang Rahmat Hidayat, Dian Wardiana**

Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

basithpatria@gmail.com<sup>1</sup>

dangerha2003@yahoo.co.uk<sup>2</sup>

dianwardiana@yahoo.co.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Achmad Abdul Basith, 210120130030, Bidang Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Tesis ini merupakan hasil penelitian berjudul “Komunikasi Politik Wali Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Walikota Bandung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kepatihan Bandung) dibawah bimbingan Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si. dan Drs. Dian Wardiana, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan efektifitas komunikasi politik Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan Bandung, yang selama ini selalu gagal ditertibkan. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Walikota Bandung Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu, Koordinator PKL Kepatihan Muhammad Taufik, dan beberapa perwakilan masyarakat Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan empat tahapan *ngobrol*, mencari solusi, penertiban, dan beautifikasi dalam menertibkan PKL Jalan Kepatihan Bandung, efektif. Ridwan Kamil juga mampu menyelesaikan permasalahan

---

<sup>1</sup> penulis

<sup>2</sup> Pembimbing utama

<sup>3</sup> Pembimbing pendamping

*Achmad Abdul Basith*

*Magister Ilmu Komunikasi*

*Fakultas Ilmu Komunikasi ©2015*

*<http://pustaka.unpad.ac.id>*

rendahnya kesadaran PKL dengan sosialisasi intensif, kurangnya jumlah Sat Pol PP dengan pengajuan PNS baru ke Kementrian dalam Negeri dan pemberdayaan Satpol PP di tingkat kecamatan, rendahnya integritas Sat Pol PP dengan pemberian sanksi tegas, menyiapkan solusi sebelum penertiban, menyelesaikan timpangnya jumlah pendapatan dengan bantuan promosi dan pemberian kredit kepada PKL, menertibkan keberadaan preman dan *backing* dengan melibatkan TNI dan Polri saat penertiban, serta memperkuat komitmen dalam menata Kota Bandung. Jadi dapat disimpulkan jika komunikasi, khususnya komunikasi politik yang baik, menjadi kunci sukses dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Bandung.

### **ABSTRACT**

*Achmad Abdul Basith, 210120130030, majoring in Master of Communication Studies, Faculty of Communication, University of Padjadjaran. This thesis is the result of a study entitled "Political Communication of Bandung Mayor (Case Study of Political Communication Strategy of Bandung Mayor in Controlling The Street Vendors at Jalan Kepatihan Bandung) under the guidance of Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S. Sos., SH, M.Si. and Drs. Dian Wardiana, M.Si.*

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the strategy and political communication of Bandung Mayor Ridwan Kamil in the controlling of street vendors in Jalan Kepatihan Bandung, which has always failed to put in order. The method used on this research is qualitative method with case study approach. Data collection techniques in this study using in-depth interviews, observation, and document studies, and literature. In this study, researchers interviewed the Mayor of Bandung Ridwan Kamil, Secretary of Bandung Yossi Irianto, Chairman of Commission A House of Representatives in Bandung City Haru Suandharu, The Kepatihan Street Vendors coordinator Muhammad Taufik, and some representatives of the people of Bandung.*

*Results from this study indicates where the strategy is adopted by Bandung Mayor Ridwan Kamil with four stages are chatting, searching for solutions, controlling, and beautifying the area surround Kepatihan. Ridwan Kamil was also able to resolve the problem of low awareness of street vendors with intensive socialization, lack of numbers Sat Pol PP with the filing of new civil servants to the Ministry of Home Affairs and the empowerment of Sat Pol PP at the district level, lack of integrity Sat Pol PP with the provision of strict punishment, prepare a solution before the demolition, resolve differences in the amount of income with support the promotion and provision of credit to vendors, to curb the hoodlum and "backing" by involving the military and police, as well as strengthen the commitment in organizing the Bandung. So it can be concluded if the communication, particularly good political communication, the key to success in controlling of street vendors on Jalan Kepatihan Bandung.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah (Perda) no. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), yang salah satu isinya mengisaratkan kawasan 7 titik (Alun-alun, Jl. Kepatihan, Jl. Dalem Kaum, Jalan Asia Afrika, Jl. Merdeka, Jalan Otista dan Jl. Dewi Sartika) harus terjaga kebersihan dan ketertibanya, termasuk dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seringkali berjualan hingga memenuhi badan jalan dan menghambat laju arus lalu lintas.

Sayangnya, aturan hanyalah aturan. Penegakan terhadap aturan tersebut masih lemah. Sehingga hampir di semua titik itu, dibanjiri Pedagang Kaki Lima, khususnya di kawasan Jalan Kepatihan Bandung yang lokasi bersebelahan dengan rumah dinas Walikota Bandung. Permasalahan PKL di Kota Bandung sudah menahun. Setidaknya pada masa pemerintahan sebelumnya, permasalahan PKL tak mampu diselesaikan. Khususnya di kawasan 7 titik tersebut.

Pada awal kepemimpinannya, Walikota Bandung Ridwan Kamil berusaha menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Selain memberikan sanksi tegas, Ridwan juga berupaya agar aturan itu juga dapat dijalankan dengan penuh kesadaran oleh semua pihak.

Setelah menempuh proses komunikasi politik yang cukup panjang, akhirnya PKL di kawasan Kepatihan bersedia untuk dipindahkan. PKL di kawasan ini ternyata tidak semua PKL murni, tetapi beberapa

adalah salah satu bagian usaha dari pemilik toko-toko besar. Mereka sengaja menggelar dagangannya di sana, untuk menghindari pajak, sewa tempat, maupun menghampiri pengunjung yang memang banyak datang ke kawasan ini.

Menertibkan Pedagang Kaki Lima yang sudah puluhan tahun ada di kawasan Jl. Kepatihan Bandung, bukanlah perkara mudah. Namun pasti membutuhkan strategi, khususnya komunikasi politik yang baik dan cerdas dari Walikota Bandung. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara khusus dan mendalam tentang Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jl. Kepatihan Bandung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus sendiri adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Penelaah berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrument pengumpulan data. Metode penelitian ini bisa menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi-dokumentasi, kuisioner, bukti-bukti fisik, dan lainnya (Kriyantono, 2006).

Ditulis oleh Prof Deddy Mulyana dalam bukunya Metodologi

Penelitian Kualitatif, memasukan semua penelitian naturalistik ke dalam paradigma interpretif, varian-varianannya mencakup teori dan prosedur yang dikenal sebagai etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, psikologi lingkungan, analisis semiotika, dan studi kasus. Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah sistem terbatas atau suatu kasus secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam dari informasi-informasi (Creswell, 1998: 61).

Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan.

Maka, peneliti menyusun pertimbangan menentukan informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Walikota Bandung Ridwan Kamil, yang menjadi tokoh utama sebagai konseptor, pelaksana, serta penanggungjawab proses penertiban PKL di Kawasan Jalan Kapatihan Bandung.
2. Sekda Kota Bandung, Yosi Irianto, yang menjadi komunikator untuk internal Pemkot Bandung.
3. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara yang menjadi komandan lapangan penertiban PKL membawahi personilnya dan petugas TNI dan Polri yang diperantukan untuk turut mengamankan.
4. Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu

5. Koordinator PKL Kapatihan, Muhammad Taufik, yang merupakan *opinion leader* dari ratusan PKL yang ada di kawasan Kapatihan Bandung
6. Perwakilan masyarakat yang menjadi penerima kebijakan, baik sebagai yang terganggu keberadaan PKL maupun yang juga terdampak denda 1 juta jika memberli di PKL.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data-data primer. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tidak terstruktur untuk mendapatkan kedalaman data yang diinginkan.

## **HASIL DAM PEMBAHASAN**

Melihat berbagai permasalahan yang sudah bertahun-tahun terjadi di Kota Bandung, Walikota Bandung Ridwan Kamil memetakan penyebab permasalahan PKL di Kota Bandung, dan merumuskan berbagai formula khusus untuk menangani permasalahan tersebut, diantaranya:

### **a. Strategi Atasi Permasalahan Rendahnya Kesadaran PKL Terhadap Aturan**

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bekerja keras memutar otak mencari solusi rendahnya kesadaran warganya dalam turut menjaga ketertiban kota. Sebelum melangkah ke masalah PKL yang melibatkan ratusan orang, sekilas kita tengok permasalahan sampah yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang di Kota Bandung belum mampu teratasi. Jika alasannya fasilitas tempat sampah, harusnya masalah ini sudah selesai jauh-jauh hari saat pemerintah

menyediakan fasilitas itu. Tapi nyatanya tidak.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada masalah PKL. Saat aturan sudah ada, dan berbagai berbagai cara dilakukan untuk menyampaikannya kepada PKL maupun masyarakat sudah ditempuh. Maka pertanyaan besar mengarah pada kesadaran pribadi masyarakat Bandung akan ketertiban kotanya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil akhirnya memilih berinovasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sejak lama di Bandung. Menurutnya jika menggunakan cara-cara lama kadang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka mengubah pendekatan menjadi pilihan.

Membangun kesadaran warga Bandung dan PKL dimulai dengan penyampaian informasi berupa aturan yang tertuang dalam perda maupun berupa kebijakan langsung walikota. Ridwan Kamil melakukannya melalui media massa. Pertama, Ridwan Kamil memanfaatkan siaran radio sebagai salah satu upayanya. Seminggu sekali Ridwan hadir sebagai narasumber utama untuk mendengarkan aspirasi warga melalui siaran radio PRFM 107.5. Dalam kesempatan ini Ridwan Kamil juga menyampaikan pesan-pesan untuk berlaku tertib bagi kepada warga Bandung.

Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga aktif memberikan pernyataan kepada wartawan. Ridwan Kamil termasuk walikota yang sangat mudah dijangkau media. Dalam berbagai kesempatan Ridwan Kamil selalu menyempatkan untuk memberikan keterangan pers. Kesempatan itu Ridwan Kamil manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan ketertiban

kepada warga Bandung baik di media elektronik seperti radio dan TV, media cetak seperti koran, dan media online.

Ridwan Kamil juga dikenal sebagai walikota yang aktif berkomunikasi melalui media sosial. Setidaknya ada tiga akun media sosial yang kelolanya langsung, tanpa menggunakan asisten khusus. Ada facebook, twitter, dan instagram. Melalui media sosial Ridwan aktif menyampaikan ide dan gagasannya, serta program-program pembangunan kota. Juga berkomunikasi langsung kepada masyarakat tanpa ada batasan prosedural yang biasa dilakukan oleh protokoler.

Selain penyampaian informasi secara konsisten melalui media massa, menurut Ridwan Kamil penegakan aturan juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Cara yang dilakukan adalah dengan memaksa warga untuk taat aturan, sebagai salah satu upaya penyadaran dan cara membentuk sikap dan mental tertib warga Bandung.

#### **b. Strategi Atasi Kurangnya Jumlah Petugas Sat Pol PP**

Walikota Bandung Ridwan Kamil memiliki permasalahan dengan jumlah personilnya dalam menertibkan aturan. Yaitu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Kota yang dihuni sekitar 2,4 juta jiwa ini, kini tercatat hanya memiliki sekitar 430 PNS yang bertugas di Sat Pol PP Kota Bandung, dan hanya 120 diantaranya yang bertugas di lapangan. Itu pun ada beberapa yang mulai memasuki masa pensiun. 120 anggota Sat Pol PP itu tidak hanya bertugas mengawal tegaknya perda K3 atau menertibkan PKL, tetapi juga harus mengawal puluhan Perda Kota Bandung yang lain.

Untuk itu, secara normatif Ridwan Kamil juga melakukan pengajuan personil tambahan melalui kementerian dalam negeri. Hanya saja jumlah yang disetujui dan lolos seleksi CPNS hanya berjumlah 51 orang. Jumlah yang masih jauh dari kebutuhan Kota Bandung.

Cara lain yang dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membentuk tim ketertiban di masing-masing kecamatan yang secara langsung mereka bisa melakukan tindakan di kewilayahan. Selain untuk menyiasati jumlah personil Sat Pol PP yang terbatas, penempatan pasukan ketertiban di kecamatan ini sebagai upaya untuk menyebar kewenangan dan memberikan tanggungjawab kepada wilayah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Ada 300 personil pasukan ketertiban yang disebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Artinya di setiap kecamatannya ada 10 personil. Mereka dibekali seragam khusus warna hijau seperti hansip dan digaji oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan penertiban Ridwan Kamil juga melibatkan aparat keamanan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah aparatnya di Sat Pol PP tidak akan cukup untuk berhadapan dengan PKL di Jl. Kepatihan. Maka secara khusus Walikota datang ke Markas Kodim 0618/Bs dan Mapolrestabes Bandung untuk meminta Bantuan personil untuk melaksanakan tim gabungan. Alhasil penertiban PKL di Jl. Kepatihan dilakukan oleh tim operasi gabungan yang melibatkan Sat Pol PP, TNI, dan Polri.

### **c. Strategi Atasi Permasalahan Penertiban Tanpa Solusi**

Sebelum melakukan penertiban di Kepatihan misalnya, Ridwan Kamil telah menyiapkan tempat relokasi di kawasan Pasar Gedebage. Di lokasi ini sudah disiapkan sedemikian rupa demi kenyamanan bagi PKL.

“Kami sudah siapkan di Gedebage. Masalah pindah sudah dipikirkan matang-matang. Coba lihat padagang Gedebage sekarang pada sukses, dulunya mereka adalah pedagang di Cibadak dan Tegalega,” kata Ridwan Kamil.

Pernyataan Ridwan Kamil di atas sekaligus menjawab keraguan PKL tentang lokasi yang disiapkan oleh Pemkot Bandung bukanlah lokasi yang “hidup” dan berpotensi mendatangkan keuntungan. PKL Kepatihan juga menganggap bahwa di Gedebage lokasinya sepi sehingga barang jualannya tidak laku. Tapi Ridwan Kamil menyampaikan, jika pedagang-pedagang sukses di Gedebage saat ini adalah PKL yang sebelumnya berjualan di Tegalega dan Kepatihan.

Menyiapkan pembangunan pasar sebagai lokasi untuk berjualan adalah solusi yang disiapkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan mengaku jika dirinya tidak akan melakukan penertiban jika belum ada solusinya. Bahkan Ridwan Kamil memiliki rencana untuk memasukkan semua PKL di Bandung ke dalam pasar.

### **d. Strategi Atasi Permasalahan Timpangnya Jumlah Pendapatan PKL**

Walikota Bandung Ridwan Kamil memberikan solusi untuk membantu pemasaran PKL yang mau direlokasi ke tempat baru. Bahkan ia

menjamin jika di lokasi baru tidak kalah ramai dan menguntungkannya jika dibandingkan dengan lokasi lama. Hanya saja belum sampai langkah itu dilakukan, PKL sudah memaksa untuk meninggalkan tempat relokasi yang disiapkan pemkot dengan berbagai alasan.

“Nah kalau promosi itu khusus kepatihan, nggak sempet terjadi sudah diberi pengawalan tidak sempat terjadi karena merekanya tidak sabar. Kan suruh pindah dulu nanti saya suruh promosi. Nah pindahnya aja masih banyak masalah,” kata Ridwan Kamil.<sup>4</sup>

Namun untuk PKL daerah lain, Ridwan Kamil mengungkapkan jika dirinya sudah membantu promosi untuk memangkas timpangnya jumlah pendapatan dari lokasi berjualan lama dengan lokasi berjualan baru. Hal itu dilakukan untuk PKL di Jalan Merdeka yang direlokasi ke *basement* Bandung Indah Plaza (BIP). Promosi itu dilakukan melalui spanduk yang dipasang oleh pemkot tentang pemberitahuan PKL kini berada di *basement* serta melalui media sosial pribadi Ridwan Kamil.

Timpangnya jumlah pendapatan juga coba diselesaikan dengan bantuan modal. Karena dengan modal PKL bisa beralih menjadi pengusaha mikro kecil yang lebih layak dan memiliki orientasi bisnis menjanjikan. Bantuan modal itu berupa kredit lunak dengan bunga yang sangat minim. Namanya Kredit Melati (Melawan laju Rentenir). Hal ini

juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Bandung khususnya bagi kalangan masyarakat bawah karena kasusnya selama ini yang miskin semakin miskin karena terjerat hutang dengan bunga berlipat yang diberikan oleh rentenir.

#### **e. Strategi Atasi Keberadaan Preman dan *Backing* PKL**

Keberadaan preman dan orang besar di balik PKL Kepatihan menjadi masalah tersendiri. Hal itu yang coba diselesaikan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan cara melibatkan Petugas TNI dan Polri dalam setiap operasi penertiban yang dilakukan.

Ridwan Kamil mengakui jika pasukan Satpol PP Kota Bandung sering tidak dihargai oleh PKL. Sehingga ketika melakukan penertiban PKL hanya minggir sebentar kemudian kembali berjualan ketika petugas sudah berlalu. Bahkan tak jarang adu mulut antar petugas dan PKL yang seolah memperlihatkan bentuk perlawanan yang dilakukan PKL kepada petugas.

Jika hal tersebut dibiarkan tanpa ada solusi, maka sudah pasti bahwa upaya penertiban PKL di Kota Bandung tak akan berhasil. Ridwan Kamil mengakui jika Sat Pol PP tidak punya wibawa di depan PKL. Apalagi jika PKL sudah menyebut siapa yang melindungi mereka. Maka melibatkan TNI dan Polri dalam operasi penertiban adalah langkah yang tepat.

#### **f. Perkuat Komitmen Pemerintah Atasi Permasalahan PKL**

Salah satu janji kampanye yang digulirkan oleh pasangan Rido (Ridwan Kamil Oded M Danial) saat berlaga dalam Pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2013 lalu adalah membuat Bandung tertib dari berbagai

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

*Achmad Abdul Basith*

*Magister Ilmu Komunikasi*

*Fakultas Ilmu Komunikasi ©2015*

*<http://pustaka.unpad.ac.id>*

pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah permasalah PKL.

Maka saat terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh pasangan Rido adalah menertibkan PKL. Dan Jalan Kepatihan adalah lokasi pertama yang ditertibkan dari keberadaan PKL. Ridwan Kamil mengatakan jika niatnya menjadi walikota adalah untuk berbenah. Ridwan menegaskan jika dirinya hanya ingin menjadi walikota yang taat terhadap aturan. Untuk itu warga Kota Bandung juga diajak untuk patuh terhadap aturan.

“Saya jadi walikota kan niatnya ingin berbenah. Salah satunya membenahi kesemerawutan yang disebabkan PKL. Pada dasarnya semua orang boleh jualan, punya hak ekonomi yang dilindungi negara. Tapi tidak boleh ada kegiatan usaha yang mencederai hak orang lain. Sederhana, hidup ga bisa sendiri-sendiri. Maka harus ada aturan. Di Kota ada perda.”<sup>5</sup>

Pernyataan Ridwan Kamil mengisyaratkan bahwa sejatinya dirinya bukan anti terhadap PKL. Hanya saja lokasi berjualan di trotoar bahkan di badan jalan yang membuat kota terlihat kumuh dan semrawut, itu yang Ridwan Kamil tidak sepakat. Menurut Ridwan, di Kota Bandung sudah ada aturan yang tegas melarang aktivitas PKL di zona merah. Maka dari itu, dirinya hanya berusaha

melaksanakan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Ridwan Kamil juga mengaku jika godaan-godaan untuk menyimpang dari niat awalnya merapikan kota Bandung seringkali berdatangan. Hanya saya orang tua seringkali mengingatkan agar Ridwan teguh terhadap niatnya. Soal pengabdian Ridwan berharap masyarakat tidak meragukannya, karena sebelum menjadi walikota, Ridwan mengaku jika hidupnya sudah bahagia dan bekecukupan. Maksudnya, menjadi walikota tidak berorientasi ekonomi.

“Dikira saya berambisi, makanya kalau sudah urusan begini saya mengembalikan pada niat menjadi walikota Bandung atau jadi apa. Katakanlah besok saya tidak jadi walikota, apakah saya menderitanya? Hidup saya sudah bahagia. Cuma karena persimpangan sejarah. Saya lagi *all out* di sini karena pesan ibu saya harus jadi orang terbaik di manapun ditempatkan. Jadi setelah jadi walikota saya jadi pengusaha pasti saya akan *all out*, kalo saya jadi dosen saya *all out*, jadi arsitek saya 10 besar se Indonesia,” kata Ridwan Kamil.<sup>6</sup>

### **Tahapan Penertiban PKL Kepatihan**

Tidak serta merta PKL di Jalan Kepatihan Bandung pindah saat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menginstruksikan untuk relokasi. Penolakan demi penolakan awalnya terus terjadi. Tahap demi tahap

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

*Achmad Abdul Basith*

*Magister Ilmu Komunikasi*

*Fakultas Ilmu Komunikasi ©2015*

*http://pustaka.unpad.ac.id*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.



dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung hingga akhirnya kawasan Jalan Kepatihan bebas dari PKL.

Tahapan-tahapan dalam penertiban PKL Jalan Kepatihan adalah sebagai berikut :

#### **a. Ngobrol dengan PKL**

*Ngobrol* atau menjalin komunikasi dengan PKL adalah langkah pertama yang dilakukan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam tahapan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Kepatihan Bandung. Strategi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini merupakan bentuk komunikasi propaganda. Sebab, menurutnya, tidak ada ceritanya penertiban tanpa ngobrol terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan, bahwa Ridwan Kamil benar-benar memahami betapa pentingnya peran komunikasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan.

Melalui ngobrol, Ridwan Kamil bisa menggunakan bentuk komunikasi persuasif dan propaganda, untuk mempengaruhi pemikiran para pedagang, agar mau dipindahkan. Dalam kesempatan ngobrol yang kemudian dinamakan “ngabandungan” ini, Ridwan Kamil sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada “sekat” antara kepala daerah dengan masyarakat. Sehingga komunikasi yang dilakukan mengalir, akrab dan tidak emosional dan tidak menonjolkan kekerasan.

Selain itu, dalam proses komunikasi tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga mengadakan jamuan makan-makan dengan para pedagang kaki lima. Dengan strategi “jika perut kenyang, pikiran menjadi tenang” Ridwan Kamil melakukan propaganda kepada para

pedagang kaki lima agar mau dipindahkan dari kawasan jalan Kepatihan ke kawasan Gedebage. Tidak hanya itu saja, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga menampung keluhan para pedagang kaki lima serta mencari solusi.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ridwan Kamil untuk mengetahui suara-suara dari PKL serta menyampaikan program kerjanya yang akan bersinggungan langsung dengan PKL, sehingga dapat diketahui persis apa yang menjadi masalah utama selama ini.

#### **b. Diskusi mencari Solusi.**

Setelah mendengar suara masyarakat yang terganggu aktivitas PKL serta mendengar suara langsung dari PKL Jl. Kepatihan, Walikota Bandung kemudian menyampaikan keinginannya untuk merelokasi mereka, sembari mengajak untuk bersama mimikirkan solusi dari permasalahan ini, yang terbaik untuk pemerintah kota, masyarakat, dan PKL.

Dalam diskusi yang berlangsung akhirnya ditemui kata spakat jika solusi dalam penertiban PKL Jl. Kepatihan adalah relokasi ke kawasan Gedebage. Kawasan Gedebage menjadi solusi untuk lahan berjualan baru para pedagang kaki lima, karena kawasan Gedebage merupakan pasar yang ramai. Pasalnya sebelum kawasan Jalan Kepatihan dipindahkan ke Gedebage, pedagang yang sebelumnya pindahan dari PKL Tegalega, dinilai banyak yang “sukses” untuk menjajakan dagangannya di kawasan Gedebage ini. Sehingga tidak ada alasan untuk para pedagang dari jalan Kepatihan tidak mau dipindahkan ke kawasan Gedebage. Karena sudah terbukti, bahwa berjualan di kawasan Gedebage

bisa menarik pembeli baru dan tidak merusak keindahan Kota Bandung. Khususnya tidak mengambil hak masyarakat Bandung untuk melintas dengan nyaman di kawasan jalan Kepatihan.

Dalam proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, para pedagang kaki lima diberikan pemahaman terlebih dahulu. Ada proses komunikasi yang berjalan, yakni dengan mengundang masyarakat dan pedagang pada tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Selain itu juga ada Satgas PKL. Strategi tersebut dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan pendekatan persuasif. Dengan menekankan kepada sisi emosional, bahwa masyarakat Bandung memiliki semangat masyarakat gotong royong yang tinggi, menjadikan konsep manajemen cinta ala Ridwan Kamil, bisa diterapkan dan berjalan lancar. Sebab inti dari manajemen cinta tersebut adalah gotong royong.

Ternyata setelah dijelaskan konsep tersebut, para pedagang kaki lima dan masyarakat Kota Bandung, menyetujui langkah Pemerintah Kota Bandung untuk memindahkan pedagang kaki lima dari kawasan jalan Kepatihan menuju ke kawasan Gedebage. Asal ada *win-win solutionnya* atau Pemerintah Kota Bandung memberikan solusi yang terbaik bagi para pedagang kaki lima. Karena PKL di Kota Bandung terbagi dalam dua kategori, yakni PKL memang murni sebagai profesi, ataukah PKL hanya sebagai akal-akalan, karena mereka sudah punya toko dan berkelompok ada 4 sampai 5 lapak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung menggunakan identitas PKL,

yakni Kartu PKL. Itu adalah salah satu upaya untuk menverifikasi jumlah PKL agar populasinya tidak semakin besar dan semakin banyak.

Pemerintah

Maka adanya proses Forum *Ngabandungan* ini, kembali pada *law enforcement*. Karena pada perda K3 itu trotoar adalah tempat pejalan kaki, dan ini sudah terlalu lama ditinggalkan. Sebab terlalu lama dianggap lemah, maka penegakan hukum harus dijadikan budaya. Salah satunya mewujudkan masyarakat untuk sadar hukum dan mau mematuhi hukum. adanya sanksi yang diterapkan juga harus benar-benar adil, tidak pilih kasih. Mana pedagang yang terbukti melanggar aturan, juga harus ditindak tegas.

### **c. Implementasi Penertiban PKL di Jalan Kepatihan**

Saat berbagai upaya komunikasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung telah ditempuh, maka langkah selanjutnya adalah eksekusi penertiban. Penertiban sebagai bentuk ketegasan Pemkot Bandung dalam menjalankan aturan yang sebelumnya sudah diundang-undangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda)

Upaya penertiban ini tidak hanya dilakukan oleh Sat Pol PP, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lain seperti TNI dan Polri. TNI didukung oleh prajurit dari Kodim 0618/BS dibawah Pimpinan Letkol Inf Rudy M Ramdhan. Sementara polisi dari jajaran Polrestabes Bandung yang saat itu dibawan pimpinan Kapolrestabes Abdurahman Baso.

Penertiban dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama sempat mendapatkan perlawanan dari PKL

karena hanya dilakukan oleh Sat Pol PP saja dengan jumlah personil terbatas. Maka dari itu, untuk penertiban tahap selanjutnya, dikerahkan petugas gabungan Sat Pol PP, Tni, dan Polri yang mencapai lebih dari 250 personil.

Meski masih juga mendapatkan perlawanan dari PKL, namun TNI dan Polri cenderung mampu mengatasinya, sehingga tidak terjadi perlawanan yang berlarut-larut. TNI dan Polri juga nampak lebih dihargai oleh PKL, karena secara institusi juga lebih dipercaya, kemudian tugasnya terlihat garang dengan membawa senjata api laras panjang.

Upaya penjagaan juga dilakukan pasca eksekusi penertiban PKL di Jalan Kepatihan. Penjagaan ini dimaksudkan agar PKL yang sudah dipindahkan ke kawasan Gedebage, tak lagi kembali berjualan di lokasi Jl. Kepatihan.

Penertiban ini sebenarnya disambut baik oleh PKL Kepatihan. Melalui koordinatornya Muhammad Taufik menyampaikan jika mayoritas PKL sebenarnya ingin ditata, karena sudah bosan berjualan di lokasi yang mereka ketahui dilarang. Di lokasi jalan mereka sering kucing-kucingan dengan petugas Sat Pol PP dan juga mendapatkan intimidasi dari preman yang rutin meminta jatah.

Namun Opick menyesalkan mengapa penertiban PKL hanya diberlakukan untuk PKL di Jalan Kepatihan saja, tidak menyentuh PKL-PKL di lokasi lain. Karena peraturan daerah tentang ketertiban PKL, tidak hanya mengatur PKL di Jalan Kepatihan saja, atau PKL di tujuh titik saja, tetapi berlaku umum bagi semua kawasan di Kota Bandung.

“(PKL) Kepatihan sangat-sangat mendukung sebenarnya. Memang

pihak-pihak yang tidak ingin ditata ada. Kata Pak Oded dulu kalau ini masih bisa ditata, dari 12 meter ini. Karena Pak Emil selalu mengatakan ada 7 titik yang termasuk zona merah, dalam peraturan daerah. Kalau kebijakan peraturan itu kan Perda. Perda mengikat secara keseluruhan. Kalau memang mau ditegakkan, jangan hanya 7 titik. Semuanya!” kata Opick, Koordinator PKL Kepatihan.<sup>7</sup>

Sementara upaya penertiban ini tentu juga mendapatkan dukungan politik dari DPRD Kota Bandung sebagai representasi masyarakat Kota Bandung. Ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu, jika DPRD sepenuhnya mendukung dan menyerahkan proses penertiban PKL kepada eksekutif Pemerintah Kota Bandung.

DPRD Kota Bandung juga tetap melakukan pengawasan terhadap proses penertiban PKL di Jalan Kepatihan, untuk memastikan tidak ada hak warga negara yang dilanggar dan proses penertiban tetap berjalan kondusif tanpa kekecauan berarti. Selain itu DPRD Kota Bandung juga memastikan bahwa anggaran pembinaan PKL juga tersebar merata di instansi terkait, seperti PD Pasar, Dinas KUMKM Kota Bandung, dan tentu Sat Pol PP Kota Bandung.

#### **d. Beautifikasi atau**

#### **Mempercantik Jl. Kepatihan**

Setelah PKL meninggalkan kawasan Jl Kepatihan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil adalah

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Koordinator PKL Kepatihan Muhamad Taufik, Selasa 3 Maret 2015, pukul 08.30 WIB. di Eliza Bakery Jalan Kepatihan no 21 Bandung.

beautififikasi atau mempercantik lokasi yang sebelumnya digunakan PKL berjualan. Prosen mempercantik ini dilakukan dengan membangun taman-taman kecil di tepi jalan.

Taman-taman yang ada di Kepatihan terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah taman yang sengaja di bangun di sisi-sisi jalan dengan pot kotak dari semen. Sementara beberapa pohon yang ada di pinggir jalankepatihan adalah pohon hasil pemimndahan dari jalan asia afrika.

Hal tersebut dilakukan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk menyulap kawasan Kepatihan yang semula semrawut menjadi jalan yang indah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di kanan dan kiri jalan.

Tak hanya itu, jalan yang semula hanya serah kini dibuat menjadi dua arah. Semula hanya dari arah Jalan Orista menuju Jalan Dewi Sartika, pasca penertiban pengemudi bisa melaju pula dari arah Jl Dewi Sartika menuju Jl. Otista. Pemberlakuan dua arah Jl. Kepatihan merupakan strategi agar badan jalan maksimal digunakan oleh pengendara jalan, sehingga PKL akan susah untuk kembali berjualan di lokasi ini.

“Tahu ga, kenapa Kepatihan dibuat dua arah? Itu trik. Supaya mobil menggeser, kalau dia satu arah PKL akan merangsek karena cukup, kalau dua arah kan nggak mungkin,” kata Ridwan Kamil

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan penelitian ini sebagai berikut:

- Permasalahan klasik tentang tidak tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung berlangsung belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disebabkan oleh : a) Rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan, b) Kurangnya jumlah petugas Sat Pol PP, c) Rendahnya integritas petugas Sat Pol PP , d) Penertiban PKL dilakukan tanpa solusi, e) Timpangnya jumlah pendapatan PKL di lokasi lama dengan lokasi baru, f) Keberadaan preman dan *backing* PKL, g) Lemahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan PKL.
- Untuk menyelesaikan permasalahan klasik PKL di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memiliki strategi komunikasi politik dalam upaya penertibannya, seperti: a) Menyampaikan pesan intensif untuk berlaku tertib melalui komunikasi langsung, spanduk, pesan di media massa, dan media sosial, b) Mengajukan penambahan kuota PNS untuk Sat Pol PP ke Kemendagri dan membentuk tim ketertiban yang dibiayai APBD dengan jumlah 10 personil per kecamatan, c) Melakukan penyitaan HP sebelum operasi serta memberi hukuman tegas bagi oknum petugas Sat Pol PP yang terbukti melakukan pelanggaran aturan, d) Menyiapkan lokasi relokasi seperti pasar, kios, dan gang jalan yang tidak mengganggu, e) Memberikan

*Achmad Abdul Basith*

*Magister Ilmu Komunikasi*

*Fakultas Ilmu Komunikasi ©2015*

*http://pustaka.unpad.ac.id*

kredit Melati (melawan laju rentenir) dengan plafon Rp 500 ribu – Rp 30 juta, f) Membentuk tim gabungan yang melibatkan TNI dan Polri, g) Memperkuat komitmen untuk “beberes” Bandung diantaranya penertiban PKL.

- Strategi komunikasi politik Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam menangani permasalahan klasik tidak tertibnya PKL di Kota Bandung efektif melihat tuntasnya permasalahan PKL di Jalan Kepatihan. Efektifitas komunikasi politiknya diantaranya berkat pendekatan yang dilakukan Ridwan Kamil ke berbagai pihak termasuk PKL Kepatihan melalui forum ngabandungan, serta ketegasan dalam penertiban yang juga melibatkan TNI dan Polri. Menyiapkan lokasi relokasi di Gedebage juga merupakan solusi yang baik dalam penertiban PKL Jl Kepatihan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemkot Bandung adalah bandelnya PKL yang memaksa untuk kembali berjualan di Jalan Kepatihan. Namun Pemkot tetap konsisten melarangnya, dan memberi alternatif tempat berjualan di Gang Kebumen, dekat dengan Jalan Kepatihan.

## **SARAN**

1. Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Bandung dianggap berhasil, karena mampu membuat kawasan yang sebelumnya penuh sesak oleh PKL sampai kendaraan pun

sulit melintas, sekarang menjadi nyaman dilalui kendaraan dua arah. Namun penolakan PKL untuk menempati lokasi relokasi yang disiapkan oleh pemkot Bandung di Gedebage, adalah wujud belum matangnya konsep pemindahan dan mentahnya komunikasi yang dibangun pemkot dengan PKL. Peneliti menyarankan untuk penertiban PKL di titik lain, seyogyanya terlebih dahulu matang dalam konsep, khususnya solusi pasca ditertibkan. Lokasi yang disiapkan untuk relokasi harus siap 100 % sebelum digunakan. Tidak hanya lokasi, tapi juga fasilitas pendukung seperti listrik dan sarana promosi agar tidak terjadi ketimpangan jauh dari segi pengunjung atau konsumen.

2. Dalam menumbuhkan kesadaran warga, khususnya PKL perlu dilakukan melalui komunikasi politik yang intensif. Empat kali pertemuan sebelum melakukan penertiban dirasa sangat kurang untuk mewujudkan pemahaman dan kesepakatan. Sehingga jika dipaksakan untuk dilakukan penertiban maka akan terjadi penolakan-penolakan dari PKL. Selain itu sosialisai Perda no 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL perlu gencar dilakukan. Sehingga masyarakat yang mengetahui jika membeli di PKL Zona

Merah dikenakan denda Rp 1 juta semakin banyak, dan membuat mereka enggan membeli ke PKL. Jika permintaan berkurang, maka penawaran pun akan berkurang.

3. Penertiban PKL di Kota Bandung perlu dilakukan bertahap dan terukur. Dalam setahun, cukup jika penertiban dilakukan di 2-3 titik lokasi PKL, namun mantab. Maksudnya PKL benar-benar berhasil

dipindahkan dengan solusi yang sudah disiapkan, tanpa ada kendala kembali lagi dan kembali lagi. Saran ini diberikan melihat semangat luar biasa dari Pemkot Bandung untuk menertibkan PKL, namun terlihat persiapannya belum terlalu matang. Sehingga saat dilakukan penertiban kemungkinan kegagalannya masih cukup besar.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos.,S.H.,M.Si. sebagai dosen pembimbing saya, Koordinator Prodi Jurnalistik, teman diskusi yang selalu dengan telaten memberi arahan, serta mengingatkan peneliti untuk fokus dan segera menyelesaikan Tesis ini di tengah sejumlah kesibukan yang menjadi penghambat.
2. Drs. Dian Wardiana,M.Si. yang juga sebagai pembimbing saya dan orang tua yang memberi arahan dalam penelitian Tesis ini dan tak pernah pelit berbagi pengalaman baik dalam dunia penelitian maupun dunia penyiaran yang sama-sama kami geluti.
3. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk peneliti wawancara sebagai narasumber utama dan kunci dalam penelitian ini. Beliau juga memberikan banyak akses baik berupa data maupun relasi untuk melengkapi penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Creswell, Jhon W. 1998. *Quality Inquiry & Research Design Choosing Among Five Tradition*. London : Sage Publiciation.
2. Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Sosial*. Yogyakarta : Tiara Kencana.
3. Meleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

4. Mulyana, Deddy. 2002. *Metode Penelitin Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komuikasi dan ilmu sosial lainnya*, : Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
  5. Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
  6. Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
  7. Mubarok, Mufti. 2012. *Menang Tanpa konsultan*, Surabaya: Reform Media
  8. Lilleker, Darren. 2006. *Key Concepts in Political Communication*, London: Sage Publications.
  9. Venus, Antar. 2009. *Menejemen Kampanye; Panduan Teroritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
  10. Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus : Desain Dan Metode*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
  11. Venus, Antar, 2009, *Manajemen Kampanye, Panduan Teoritis dan Praktis dalam mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
  12. Gaffar Afan, 2006, *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  13. Firmaansyah, 2008, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realistas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
  14. Agustino, Leo, 2007, *Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
  15. Muhtadi, Asep Saeful, 2008, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  - 16.
- Sumber Internet**
17. [www.bandung.go.id](http://www.bandung.go.id) , diakses pada 21 Juli 2014, pukul 16.00 WIB
  18. [www.bandungjuara.com](http://www.bandungjuara.com), diakses pada 21 Juli 2014, pukul 18.00 WIB
  19. [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses pada 20 September 2014, pukul 08.00 WIB
  20. [www.prfmnews.com](http://www.prfmnews.com), diakses pada 17 Februari 2015, pukul 19.00 WIB
  21. [www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses pada 13 Maret 2015, pukul 22.00 WIB.
  22. [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 6 Desember 2014, pukul 06.00 WIB.
  23. [www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses 7 April 2015, pukul 15.00 WIB
  24. [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), diakses 8 November 2014, pukul 09.00 WIB